

Potensi Perampasan Aset sebagai Pidana atas Tindak Pidana Pembalakan Liar untuk Memulihkan Ekosistem = The Potential for Asset Forfeiture as a Penal Sanction for the Crime of Illegal Logging to Restore the Ecosystem

Manurung, Stephen Joy Herald, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920568819&lokasi=lokal>

Abstrak

Tulisan ini menganalisis bagaimana pengaturan pidana perampasan aset dalam tindak pidana pembalakan liar. Tindak pidana pembalakan liar merupakan tindak pidana yang memiliki sifat destruktif baik terhadap lingkungan hidup maupun sosial masyarakat. Apabila ditelusuri lebih dalam, para pelaku pembalakan liar melakukan tindak pidana ini dengan motif ekonomi sehingga tindak pidana ini dikenal memiliki sifat khas, yakni high reward. Di sisi lain, peraturan perundang-undangan serta praktik penegakan hukum belum mampu menysar kekhasan tindak pidana pembalakan liar ini. Ketentuan pidana perampasan aset yang berpotensi untuk digunakan untuk menghilangkan sifat high reward dan memulihkan sifat destruktif dari tindak pidana pembalakan liar justru ditempatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) dalam posisi yang tidak strategis. Hal ini mengakibatkan penegakan hukum perampasan aset menjadi sangat terbatas. Tulisan ini akan membahas tataran teoretis berupa ketentuan tujuan pemidanaan dan pidana perampasan aset dalam UU P3H yang disertai dengan perbandingan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan negara Amerika Serikat. Selain itu, tulisan ini akan mengulas tataran praktis melalui analisis putusan pengadilan terkait tindak pidana pembalakan liar. Secara keseluruhan, tulisan ini akan membahas potensi pidana perampasan aset dalam meminimalisasi sifat high reward dan memulihkan sifat destruktif dari tindak pidana ini.

.....This paper analyzes how the criminal regulation of asset forfeiture in the crime of illegal logging. Illegal logging is a criminal offense that has a destructive nature both to the environment and social community. If further examined, the perpetrators of illegal logging commit this crime with economic motives so that this crime is known to have a distinctive nature, namely high reward. On the other hand, legislation and law enforcement practices have not been able to target the distinctiveness of the crime of illegal logging. Criminal provisions for the asset forfeiture, which have the potential to be used to eliminate the high reward nature and restore the destructive nature of the crime of illegal logging, are instead placed by Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Damage (P3H Law) in a non-strategic position. This has resulted in very limited law enforcement of the asset forfeiture. This paper will discuss the theoretical level in the form of provisions on the purpose of punishment and sentence of asset forfeiture in P3H Law accompanied by a comparison with other laws and regulations and the United States. In addition, this paper will review the practical level through the analysis of court decisions related to the crime of illegal logging. Overall, this paper will discuss the potential of criminal asset forfeiture in minimizing the high reward nature and restoring the destructive nature of this crime.